



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ආයතනික පාලන ආයතන

BADAN PENDAPATAN DAERAH

අප්‍රති ආදායම් ප්‍රතිපාදන ආයතනික පාලන ආයතන

Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar, Telp. (0361) 239079,239080,Fax. (0361) 261246

Laman: <https://pendapatan.denpasarkota.go.id>, Pos-el: pendapatan@denpasarkota.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR : B/100.3.3/894/BAPENDA

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/100.3.3/894/BAPENDA TAHUN 2026 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Juli 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana
Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar



I Dewa Gede Rai, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199203 1 004

LAMPIRAN I : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI, BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 28 JULI 2026
NOMOR : B/100.3.3/894/ BAPENDA
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : B/100.3.3/894/BAPENDA

Pada hari Kamis, tanggal 09 bulan Juli tahun 2026 bertempat di daring *zoom meeting* telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
1	BAPENDA Kota Denpasar	Laporan pajak pajak pribadi	a. UU No 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. c. c. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi Data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Dibuka apabila : 1. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 2. Permintaan dan/ atau persetujuan sendiri 3. Permintaan Institusi/lembaga berwenang

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.			
2	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Peraturan Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Diperuntukkan kepada tim Penyusun Regulasi 2. Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan
3	BAPENDA Kota Denpasar	Rancangan Keputusan tentang pengelolaan Keuangan dan Pendapatan	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf . b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. c. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Diperuntukkan kepada tim Penyusun Regulasi 2. Setelah disahkan dan ditetapkan menjadi Keputusan

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
4	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen Kelengkapan pertanggung jawaban Belanja	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17. b. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila: 1. Selama masih digunakan/berlaku 2. Terdapat Permintaan tertulis untuk pemeriksaan
5	BAPENDA Kota Denpasar	Dokumen transaksi kas masuk bank dan kas keluar di rekening kas daerah	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Membantu badan publik mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Dibuka apabila : 1. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 2. Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait
6	BAPENDA Kota Denpasar	Data wajib pajak dan Laporan Penghasilan/omset wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	Dibuka apabila: 1. Selama masih digunakan/berlaku 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 3. Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah			
7	BAPENDA Kota Denpasar	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan 3. Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait 4. Permintaan wajib pajak itu sendiri
8	BAPENDA Kota Denpasar	Berkas Pelayanan yang diajukan wajib pajak	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan	Apabila dibuka berpeluang menjadi penyalahgunaan	Melindungi kerahasiaan data wajib pajak	1. Selama masih digunakan/berlaku. 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah

No	Pemilik Informasi	Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Ditutup	
			Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang c. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			pengadilan 3. Terdapat kerjasama dengan Pihak Terkait 4. Permintaan wajib pajak itu sendiri
9	BAPENDA Kota Denpasar	Sistem Manajemen Database	a. UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku
10	BAPENDA Kota Denpasar	Data Pribadi Pegawai	UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Dibuka apabila : 1. Pihak yang memiliki hak atas kerahasiaan informasi tersebut memberikan persetujuan 2. Memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan

Bahwa Hari Kamis, 09 Juli 2026 telah terlaksana Pengujian Konsekuensi atau Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Ida Ayu Dewi Citrawati	Dinas pariwisata	
Ari Kusuma Wijaya	Desa Dangin Puri Kelod	
Ni Made Ambarani Sumerta Putri	Kelurahan Kesiman	
Angga pratama	Peguyangan kaja	
Dra. I Gusti Agung Ayu Oka Mayudhiani	Bagian Adbang Setda Kota Denpasar	
I Gede Umbu Bhakti	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar	
I M. Adi Purbanegara	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	
Putu Dewi Yumiartini, S.E.	Kelurahan Kesiman	
Luh Nyoman Endi Suari,S.Sos	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	
Ni kadek yuli lestari	Badan kesatuan bangsa dan politik kota Denpasar	
ni putu sandyaswari	dinas pariwisata kota denpasar	
Putu Indra Krisnawan, S.E.	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	
Ni Made Rai Ani, SE	Kecamatan Denpasar Barat	
Ni Nyoman Seniawati	Kelurahan Sesetan	
I Gede Arya Anggra Diguna	Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar	
berta ardisurya	DLHK	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
I Ketut Adi Sutrisna	AMSI Bali	
Anak Agung Mas Pradnyandari Mantara, S H	Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
I GEDE BUDIARTHA	DESA SUMERTA KAJA	
I Wayan Andi	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
PUTU RIKA RUSWIRYANI,SE	PERUMDA AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA	
Putu Sofyan Kusuma	Desa Pemecutan Kaja	
GUSTI AYU MADE SURYANI,SE.MAP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
I Ketut Purna, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	
Anak Agung Ketut Putriasri, SE	Dinas Pertanian Kota Denpasar	
Ni Wayan Suarni	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
Ni Made Dewiyanti, S.ST.Par.,M.Par	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	
I Gusti Ayu Tia Dewi Prawita, SKM	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	
Anak Agung Ngurah Ari Dwiatmika, S.H., M.Kn.	BRIDA Kota Denpasa	
I Made Nanda Agustika	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	
Ni Nengah Samiadi, S.Ag	Kecamatan Denpasar Barat	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Anom Putri Lestari	Dauh Puri Klod	
ni wayan saptiari	pemerintah desa ubung kaja	
I MADE KARTIKA	DESA SANUR KAUH	
Dewa ayu putu ekayanti, SP	Dinas pertanian	
Gusti Ayu Made Putri Yuniswari, S.STP., M.A.P.	Kelurahan Pemecutan	
Ni Wayan Susilawati	Kelurahan Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur	
SRI PUJI ASTUTI, SH	KELURAHAN RENON	
I WAYAN SUTARJA PUTRA, S.H.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR	
Bdn. Anak Agung Ayu Dewi Purnami, SST	RSUD Wangaya	
IDA BAGUS AGUNG UPAWANA MANUABA	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	
I Putu Eka Pertama,S.Sos.,M.AP.	Kecamatan Denpasar Barat	
Anak Agung Gde Agung Aricahya	Baguan Administtasi Pembangunan	
Ida Ayu Agung Nusantara	Kelurahan Sesetan	
Nyoman Sukrani	desa tegal kertha	
NI MADE RAKA KUMARAWATI	KECAMATAN DENPASAR TIMUR	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Gusti Nyoman Parwati, S.E	Kelurahan Dangin Puri	
Ketut Ary Diana Artha, S.KM., M.Kes	Dinas Kesehatan	
I Gede Putu Krisna Juliharta	Relawan TIK Bali	
I Made Wahyu Artana, S.E.	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
NI NYOMAN SRIWIRANI WIDOWATI	DINAS KOPERASI UMKM KOTA DENPASAR	
I MADE AGUS SUTEJA, SE, M.Si	DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR	
I Made Sarmadi	Desa Kesiman Kertalangu	
Desak Made Ekaprastyawati, S.P.	PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA	
Mega Asmara Purwantini, S.STP	KECAMATAN DENPASAR SELATAN	
I NYOMAN NESA MAS GUNADI	KELURAHAN SESETAN	
I Gede Satya Adhi Wicaksana	Dinas Sosial Kota Denpasar	
Ida Ayu Cininta Padangratha	BKPSDM Kota Denpasar	
Dr. Ir. I Dewa ketut Adi Pradnyana, S.SiT. M.T., IPM.	Dinasa Perhubungan	
I Gede Sukana Dananjaya	DPMPTSP Kota Denpasar	
Ni Luh Made Mustikayanthi, S.E	Bagian tata pemerintahan setda kota denpasar	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
A.A. Ngr Indra Kumara Putra	Dinas Pariwisata	
I NYOMAN DASNA ADNYANA	DESA DANGIN PURI KANGIN	
Ni Made Sri Wahyuni, S.Sn.	Kelurahan Sumerta	
I putu Pujawan	Dinas pariwisata kota denpasar	
A.A.A. NGR. SRI UTAMI WIJAYANTI	DESA PEMOGAN	
I Wayan Purwanatha, S.Pd	Desa Pemecutan Kelod	
Ni Putu Ari Widiastuti	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	
A.A. Gede Alit Wisnu Juliantara, S.S.	Bagian Kerja Sama Setda Kota Denpasar	
Ni Wayan Vijayanthi Sari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Renita Intan Cahyani, S.K.Pm	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar	
Anak Agung Istri Pramitha Swari,S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan daan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
Anak Agung Gede Mahendra	Bappeda Kota Denpasar	
I Gusti Ngurah Aditya Putra	Dishub Denpasar	
Ida Bagus Putu Jayawiguna	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Desak Eka Nila Prastyawati	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Anak Agung Istri Pramitha Swari,S.Kom	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
Anak Agung Gede Mahendra	Bappeda Kota Denpasar	
I Gusti Ngurah Aditya Putra	Dishub Denpasar	
Ida Bagus Putu Jayawiguna	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
Desak Eka Nila Prastyawati	Perumda Bhukti Praja Sewakadarma	
NI PUTU ANINDITA ADI PURWANI, S.H.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR	
Ni Made Ayu Krisna Dewi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	
Ni Made Dwi Lestari	Desa Sanur Kaja	
Ni Nyoman Uripayani,S.E.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	
Rai Suryathi	Brida	
PUTU RISKAYANA FEBRIANA	DESA SIDAKARYA	
Made Ayu Wahyuni,SE.,M.Si	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	
I Nyoman Veldy Destriandi, A.Md	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	
I Gusti Ayu Istri Raka, S.H.	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
I ketut alit wijana	Bagian umum setda	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Ni Made Ayu Agustini, SE.,MM	Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	
A.A. Trisha Dewi Parasthiwi, S.E	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar	
I Gede Wahyu Agustiana Putra, S.Kom	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	
Luh Putu Ratna Iswari, S.E,Ak	Perumda Pasar Sewakadarma	
Ni Ketut Santyani,S.Sos	Kelurahan Ubung	
Ni Made Dwi Primadani	Kelurahan Tonja	
Ni Nyoman Suwantari	Desa Tegal Harum	
I Nyoman trisna Cahya Nugraha	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	
Ni Ketut yuliani	Kelurahan peguyangan	
I Gede Bagus Bayu Kresnapati, S.E.	Pemerintah Kota Denpasar	
Made Widiatmika,SE.,M.Si.	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Putu Udy Kustiawati, SE	Inspektorat	
Dewa Nyoman Suardana	Komisi Informasi Provinsi Bali	
I Nyoman Eddy Winantha, S.Sos	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar	
Ni Wayan Antari	Distan	
Soviaty Nubatonis	Desa Padangsambian Kelod	
I WAYAN SUTEJA	DESA PEGUYANGAN KANGIN	
dewa gede rai	bapenda	
I Gusti Ngurah Arnawa	Kecamatan Denpasar Utara	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
I Made Antara,SE	BPBD Kota Denpasar	
Anak Agung Bagus Mahendrayana, S.E	Desa Dauh Puri Kauh	
Putu Dicky Gunawan	Desa Penatih Dangin Puri	
I Made Dwi Suta Atmaja	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Denpasar	
Komang Puspariani, S.E	Kelurahan Renon	
Sang Nyoman Putra Arsa Wijaya	PERUMDA BHUKTI PRAJA SEWAKADARMA	
Ni Wayan Diani, SE	Kelurahan Dauh Puri	
Ni Nyoman Ayu Permayasari	Bagian Hukum	
I G A G A Widiani Kepakisan	KPID BALI	
I Gusti Ngurah Agung Sumadana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
I Putu Dede Aridana	Desa Kesiman Petilan	
I Gde Okta Satria Nugraha	Kelurahan Padangsembian	
I Nyoman Ega Beerawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	
Ida Ayu Rai Laksmi Dewi, S.T.	DPMPTSP Kota Denpasar	
Kadek Ratna Dewi	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	

Nama	Instansi	Tanda Tangan
Gung dewi	Diskominfo	
gung is	diskominfo	

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana
Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar,



I Dewa Gede Rai, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19680731 199203 1 004